

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebuah daerah yang memberikan banyak percontohan di beberapa bidang program. Diantara bidang program dari sebuah kebijakan tersebut adalah Program belabeli, gandeng gendong, selanjutnya ada program *One Village One Product* (OVOP) dan lain sebagainya. Diantara beberapa program yang disebutkan tadi, pada dasarnya program tersebut mempunyai tujuan dan sasaran yang sangat tepat demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Program Bela beli adalah salah satu program yang timbul karena faktor permasalahan yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Mengingat permasalahan itu berupa tentang kemiskinan, dengan adanya persoalan itu makanya gerakan ini dicetuskan oleh Bupati Kulon Progo pada pertengahan tahun 2012. Sebenarnya gerakan bela beli ini adalah gerakan yang muncul berdasarkan kemandirian pada masyarakat setempat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Disamping itu juga gerakan bela beli ini merupakan strategi Pemerintah yang bertujuan agar masyarakat setempat mau membela daerahnya sendiri adapun dengan cara memproduksi dan mengkonsumsi produksi daerah Kulon Progo. Sehingga dengan demikian harapanya gerakan bela beli bisa mengatasi kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo, dan sekaligus untuk mewujudkan kedaulatan dalam bidang pangan dan energi.

Program gandeng gendong adalah program yang diluncurkan oleh Pemerintahan Kota Yogyakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan kata lain tujuan dari implementasi program gandeng gendong ini adalah sebagai program pemberdayaan masyarakat dan mengatasi kemiskinan demi untuk mewujudkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Program gandeng gendong ini juga sangat berpartisipasi dan bekerja sama dengan berbagai elemen yaitu mulai dari Pemerintah daerah, kampus, korporasi, kampung dan komunitas . Dengan kata lain melihat dari masalah angka kemiskinan yang tinggi di Kota Yogyakarta, Oleh karena itu Pemerintah mengambil sikap dan berinisiatif untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui program tersebut diberi nama gandeng gendong.(Antaraneews, 2018)

Salah satu program yang akan menjadi pembahasan peneliti adalah program *One Village One Product (OVOP)* di Desa Banjaroya, Kecamatan Kalibawang. Melihat dari kondisi yang ada di setiap daerah, memang menjadi suatu hal yang sangat menarik dan pastinya mempunyai kelebihan dan kekurangan di setiap daerahnya. Di setiap sumber daya yang ada ini, bisa didapat dari faktor alam dan jiwa kreativitas yang ada didalam hati sanubari manusia. Perkembangan *One Village One Product* ini juga dapat mempengaruhi berbagai perkembangan diantaranya adalah tentang peningkatan perekonomian setempat dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Melalui program ini dapat diharapkan bisa dapat diatasi permasalahan yang ada disuatu tempat tersebut.

Ternyata memang diantara beberapa program yang ada diatas tadi, karena pada dasarnya Pemerintah membuat suatu program kebijakan itu adalah tidak lain dan tidak bukan untuk mengatasi kemiskinan yang sedang melanda di daerahnya masing-masing. Kemiskinan itu merupakan permasalahan yang sangat mendasar karena ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kebutuhan, Maka dari itu pentingnya Pemerintah dan segala elemen untuk bersikap dan bertindak dengan melihat masalah yang ada. Karena memang segala upaya yang dilakukan Pemerintah itu bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada pada setiap daerahnya.

Sebagaimana mestinya didalam program suatu kebijakan itu berdasarkan pada kekuatan hukum. Untuk dasar hukum yang memperkuat pendekatan program *One Village One Product* (OVOP) terutama di Indonesia adalah Intruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tentang suatu kebijakan percepatan pengembangan pada kawasan riil dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Selanjutnya adalah Peraturan Menteri Perindustrian tentang dalam peranan peningkatan efektivitas pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) dengan cara pendekatan satu desa satu produk. Dengan adanya dasar hukum yang kuat terutama di Indonesia ini harapanya adalah untuk memberikan keadilan bagi masyarakat seluruhnya.

Adapun pengertian *One Village One Product* (OVOP) yang menjadi aturan ataupun kebijakan Pemerintah Kementrian Koperasi dan UMKM adalah Satu Desa Satu Produk atau *One Village One Product* (OVOP) adalah pendekatan pengembangan yang mempunyai suatu potensi di daerahnya di satu wilayah

untuk dapat menghasilkan satu produk dengan kelas global yang unik khas dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Dengan demikian sumber daya lokal ini yang menjadi dasar ataupun ujung tombak, semestinya hal ini dapat mejadi suatu hal yang sangat menarik bagi perkembangan ekonomi setempat. Untuk satu desa ini bakalan dapat diperluas akan menjadi Kecamatan, sedangkan Kecamatan ini diperluas menjadi Kabupaten/Kota, maupun kesatuan wilayah yang lainnya sesuai dengan adanya potensi dan sumber daya yang menghasilkan nilai ekonomi. Satu hal yang sangat menarik dengan adanya program *One Village One Product* ini adalah Pemerintah bisa menjadikan program ini suatu gerakan nasional yang perlu didukung. Sehingga dengan adanya perkembangan program ini mempunyai manfaat terbesar dan bisa mempengaruhi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang ada di daerah tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 9 Tahun 2014 tentang pedoman pengembangan produk unggulan daerah dalam Pasal 1 Ayat 2 adalah Produk unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat PUD merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun Pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global. Dengan mengacu pada Peraturan Mendagri ini melalui kekuatan dasar

hukum diharapkan inilah yang mendasari adanya proses dari pelaksanaan kebijakan dari Pemerintah untuk masyarakat, karena dengan demikian di Indonesia semuanya tergantung pada kekuatan hukum. Maka dari itu dengan adanya kekuatan hukum tentang pedoman pengembangan produk unggulan daerah tersebut, baik dalam Pemerintah ataupun pihak masyarakat dalam segi adanya hubungan atau *relationship* yang baik, karena memang peraturan Pemerintah ini dibuat sebagai bentuk adanya kepedulian pada masyarakat, dan pastinya peraturan ini dibuat sesuai keadaan masyarakat.

Pendekatan program satu desa satu produk atau yang disebut dengan (OVOP) merupakan rangkaian suatu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi perselisihan kegiatan pembangunan antara terletak kota dan pedesaan dengan mengembangkan potensi ekonomi rakyat berbasis potensi lokal, dengan cara mengembangkan produk yang mampu bersaing di tingkat pasar nasional maupun tingkat global dengan tetap menekankan pada nilai tambah lokal dan mendorong semangat menciptakan kemandirian masyarakat. Dengan demikian pendekatan program *One Village One Product (OVOP)* ini sangat mempengaruhi dan sangat bermanfaat di dalam perkembangan buat pembangunan ekonomi. Sebagaimana mestinya di dalam pembangunan ekonomi ini sangat berperan penting untuk masyarakat karena hal ini dapat mengetahui ataupun dapat memperbaiki isu atau masalah yang ada. Namun demikian, terdapat permasalahan yang terkait dengan objek yang dapat dikaji, seperti bagaimana perkembangan OVOP itu dicanangkan yaitu tidak lain dan tidak bukan karena faktor para generasi muda yang meninggalkan daerah tempatnya menuju daerah kota atau

yang disebut dengan perpindahan penduduk dari desa ke kota (Urbanisasi). Pada dasarnya hal disebabkan karena lemahnya industri setempat Selain itu konsepsi yang ditekankan dalam program ini, bahwa yang penting bukan hanya kemamuran dari segi ekonomi (Gros National Product), tetapi juga kepuasan batin (Gros National satisfacation) masyarakat setempat.(Riana, 2016).

Terlepas dari permasalahan kemiskinan yang ada, adapun Pemerintah menginisiasi untuk mengatasi permasalahan tersebut yakni dengan cara melakukan atau melaksanakan program *One Village One Product* (OVOP). Pelaksanaan program tersebut merupakan suatu cara yang menghasilkan solusi untuk meningkatkan kualitas produk unggulan suatu daerah yang dapat menghasilkan potensi yang besar dengan memanfaatkan kearifan lokal sehingga nantinya dapat meningkatkan perekonomian di berbagai daerah. Program OVOP sendiri merupakan suatu program yang dikemukakan oleh seorang Prof. Morihiko Hiramatsu. Ini adalah seseorang yang menjabat sebagai Gubernur Oita, di Jepang tepatnya pada tahun 1980. Adapun misi yang diterapkan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya program tersebut menjadikan titik kebangkitan dari warga Oita untuk mengembangkan produk unggulannya.

Kabupaten Kulon Progo adalah termasuk daerah yang memiliki keunggulan yang secara kompetitif, mandiri dibandingkan daerah yang lainnya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Terbukti dikarenakan di Kabupaten Kulon Progo sendiri berada pada jalur yang sangat strategis untuk jalur perekonomian di bagian jawa pada jalur selatan. Sebagian besar di daerah Kulon Progo merupakan

wilayah yang terbuka terhadap perekonomian setempat. Produk unggulan yang menjadi daerah kompetitif didalam bidang industri seperti pertanian, perdagangan, pengolahan dan lain sebagainya. Bahkan yang tak kalah penting lagi di Kabupaten Kulon Progo mulai ada pembangunan bandara internasional. Karena pada dasarnya dengan adanya pembangunan internasional, harapannya Pemerintah dan pihak swasta menjalin kerja sama yang cukup yang baik guna untuk mengembangkan dan menumbuhkan perekonomian melalui pendekatan *One Village One Pruduct* (OVOP) demi memenuhi kesejahteraan masyarakat setempat.

Ada beberapa produk unggul yang ada di Kabupaten Kulon Progo diantaranya adalah gula semut, kopi, olahan daun pegagan, teh, olahan lidah buaya, olahan biofarmaka, dan kakao. Pada dasarnya semua itu merupakan produk unggulan yang ada, tapi memang disisi lain terdapat banyak unggulan yang lainnya. Kabupaten Kulon Progo ini adalah suatu daerah yang cukup baik didalam melakukan pengembangan dan pembudidayaan produk unggulan. Terkhusus untuk pembahasan pada penelitian adalah pengembangan kakao. Oleh karena itu, kakao merupakan suatu produk yang berasal dari hasil pertanian masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berinisiatif untuk mengembangkan kampung kakao di Kecamatan Kalibawang dalam rangka untuk mewujudkan potensi wisata yang berada di wilayah kawasan bukit menoreh. Sementara dengan adanya hal ini artinya selaras dengan tujuan dari pelaksanaan OVOP yaitu pengembangan kearifan lokal berdasarkan sumber daya. Sedangkan untuk

membangun potensi unggulan ini seharusnya bersifat berkesinambungan (*sustainability*) melalui hasil dari olahan produk unggulan setempat. Diperlukan juga untuk berkelanjutan pembangunan ini dilandasi dengan sikap komitmen dan konsisten yang kuat dari tokoh masyarakat tersebut untuk mengembangkan produk unggulan serta yang para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik Pemerintah pusat atau Pemerintah daerah, kelompok tani dan lain sebagainya.

Terkait dengan Pemerintah Pusat dalam kegiatan pembangunan ini adalah berupaya untuk mengubah dan melakukan inovasi di bidang perkebunan, Akhirnya nantinya bisa menjadi Kawasan Strategis Pembangunan Nasional (KSPM). Terkhususnya sektor perkebunan yakni kakao supaya mendukung sektor pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan petani kakao.

Kabupaten Kulon progo terdiri dari 12 Kecamatan yang merupakan salah satu dari lima daerah otonom Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terletak pada bagian barat. Daerah ini merupakan salah satu sentra produksi produk unggulan yang berasal dari pertanian. Berikut ini merupakan suatu data produksi perkebunan kakao per kg pada tahun 2017 di setiap Kecamatan yang ada berada di Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 1.1
Data Produksi Perkebunan Kakao Per Kg Pada Tahun 2017

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Produksi (Kg) Pada Tahun 2017
1.	Temon	76,00	22.440
2.	Wates	14,71	4.038
3.	Panjatan	5,54	2.379
4.	Galur	-	-
5.	Lendah	-	-
6.	Sentolo	17,06	4.677
7.	Pengasih	197,60	65.811
8.	Kokap	1.204,00	441.522
9.	Girimulyo	642,50	240.052
10.	Naggulan	58,40	12.317
11.	Kalibawang	1.042,15	398.833
12.	Samigaluh	330,00	104.631
	Jumlah	3.587,96	1.296.700

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan, 2017

Berdasarkan pada tabel yang ada di atas merupakan data yang menggambarkan produksi perkebunan kakao per kg pada tahun 2017. Terlihat pada tabel bahwasanya dari setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Kulon Progo tingkat yang paling tinggi berada di Kecamatan Kokap yaitu 441.522 kg. Sedangkan pada tingkat bawah berada di Kecamatan Galur dan Lendah. Selanjutnya untuk Kecamatan Kalibawang per kg nya dapat menghasilkan

398.833 kg ini merupakan rata-rata yang berada ditingkat tertinggi maupun terendah. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya di setiap Kecamatan yang memiliki berat yang tertinggi maupun terendah itu tergantung pada luas lahan yang diproduksi dan faktor penghambat yang lainnya.

Kecamatan Kalibawang merupakan daerah agropolitan yang terfokus pada bidang pertanian. Pada Kecamatan Kalibawang ini adalah salah satu Kecamatan yang dapat menghasilkan kakao yang lumayan tinggi, itu berarti produksi kakao yang dihasilkan tinggi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komoditas unggulan pada sektor perkebunan di Kabupaten Kulon Progo adalah kakao. Dengan hal ini komoditas kakao ini menjadi peran unggulan yang berperan untuk menompang kehidupan masyarakat sekitar. Desa Banjaroya merupakan desa yang termasuk dari kawasan pengembangan kakao, itu terbukti Pemerintah setempat mencanangkan kampung kakao di desa tersebut.(Antaraneews, 2018)

Untuk pengembangan produk unggulan masih terdapat beberapa kendala didalam proses pengembangan diantara lain adalah dari segi kualitas pembibitan dan terkait dengan peralatan untuk memproduksi kakao tersebut. Untuk dari segi pembibitan ini masih mayoritas dalam golongan B dan C. Untuk golongan B 101 hingga 110 biji per 100 gram, dan golongan C antara 111 hingga 120 biji per 100 gram. Sedangkan untuk dari segi peralatan produksi masih kurang lengkap. Sementara yang sudah ada itu adalah alat produksi untuk pembuatan permen dan coklat batang, sementara yang dibutuhkan adalah peralatan untuk membuat bubuk coklat. Bahwasanya yang menjadi perhatian Pemerintah ketika melihat

permasalahan yang ada. Implementasi program OVOP di Kecamatan Kalibawang ini sebenarnya perlu ditingkatkan walaupun masih sedikit permasalahan.

Dari beberapa uraian yang ada di atas dengan hal ini penulis merasa tertarik dan ingin melakukan suatu penelitian mengenai program implementasi tersebut. Dalam suatu pengembangan produk unggulan di suatu tempat yang hendak penulis akan teliti. Diharapkan kedepannya dengan adanya program *One Village One Product* ini mampu menjadi solusi yang terbaik mendongkrak roda perekonomian masyarakat setempat dan dapat meningkatkan keuntungan yang lebih buat daerah tersebut. Berdasarkan uraian di atas peneliti akan menentukan topik dari judul skripsi di antara lain adalah ***Implementasi Program One Village One Product Di Desa Banjaroya, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo***”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan dikaji pada penelitian ini dapat diformulasikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program *One Village One Product* di Desa Banjaroya Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2017 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan peneliti untuk melakukan suatu penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi *One village One Product* Desa Banjaroya, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dengan secara komprehensif dapat berfungsi sebagai filter dalam memformulasikan suatu produk keilmuan baik secara tataran akademis, maupun praktis. Oleh karena itu, kegunaan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi penelitian ini sebagai landasan untuk menambah wawasan. Selain itu juga dapat menjadi referensi bagi para pengembangan ide Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan dalam melakukan penelitian dengan tema atau masalah yang serupa dengan penulis.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan atau cara pandang untuk setiap Pemerintah daerah di dalam pembuatan program kerja atau kebijakan tentang *One Village One Product*, sehingga nantinya dapat mengembangkan potensi daerahnya masing-masing.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menunjukkan signifikansi dan independensi dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan pengkajian terhadap penelitian-penelitian yang relevan atau yang sesuai terhadap objek penelitian, sehingga dapat diketahui posisi peneliti dalam penelitian tersebut. Adapun penelitian tersebut diantara lain adalah :

Berdasarkan produk unggulan keunikan makanan yang ada didalam jurnal peneliti klasifikasikan menjadi lima jurnal diantara lain adalah sebagai berikut :

Berdasarkan dari lima penelitian tersebut yaitu dari peneliti (Syakur, 2014), (oesman rality, 2016), (Nurunnisha, 2017), (Hakim, 2018), (Kutsiyah, 2017), bahwasanya dari penelitian tersebut dapat dikatakan persamaannya adalah tentang produk unggulannya berupa makanan khas yang ada, souvenir dan lain sebagainya, tetapi di lain sisi juga ada konteks yang mempengaruhi di lima tersebut yaitu tentang produk khas makanan yang ada di setiap daerahnya. Pada dasarnya dalam klasifikasi dari beberapa jurnal tersebut bisa kita ketahui bahwasanya ada perbedaan diantara lain adalah terutama dengan elit-elit yang terkait dengan proses pelaksanaan dari *One Village One Product (OVOP)*, itu bisa berupa didalam pelanggaran program ini masih terdapat kendala yang menghadang yakni tentang masalah permodalan, dari segi pemasaran produk unggulan, keterkaitan dengan teknologi, kurangnya efisiensi terhadap kelembagaan dan lain sebagainya. Itulah permasalahan yang terjadi pada setiap jurnal yang peneliti klasifikasikan. Dengan hal ini pada prinsipnya dari setiap jurnal ini sudah sesuai dengan prosedur dan tujuan yang ada.

Berdasarkan pada aspek bidang pertanian yang ada didalam jurnal tersebut peneliti dapat di klasifikasikan menjadi lima jurnal diantara lain sebagai berikut :

Berdasarkan dari lima penelitian tersebut yaitu dari peneliti (Syamsul Hadi, Olos Wasahua, 2017), (Dewangga, 2018), (Pasaribu, 2011), (Tommy & Putera, n.d.), (Winaya, Rianita, & Pascarani, 2016). Dari beberapa jurnal yang peneliti klasifikasikan dapat diidentifikasi yakni dalam hal ini peneliti tersebut lebih mengedepankan pada sektor komoditas sektor unggulan dalam pertanian contohnya adalah tanaman bahan makanan, sektor perkebunan, palawija dan lain sebagainya. Disini tujuan dari pendekatan *One Village One Product* dalam aspek pertanian adalah untuk meningkatkan kualitas pasar global, melaksanakan kegiatan pengembangan, dan meningkatkan pendapatan pada setiap daerahnya. Adapun terdapat permasalahannya yakni pada aspek permodalan untuk mengembangkan produk unggulan tersebut, dan peningkatan kinerja pada setiap lembaga yang ada.

Berdasarkan pada aspek unit kecil mikro menengah yang ada didalam jurnal tersebut peneliti dapat di klasifikasikan menjadi empat diantara lain sebagai berikut :

Berdasarkan dari empat penelitian tersebut yaitu dari peneliti (Sri & Wardani, n.d.), (Asriati, n.d.), (Sakdiyah, 2011), (Cahyani, 2013). Dari beberapa jurnal yang peneliti klasifikasikan dapat dikatakan bahwasanya ternyata didalam penentuan studi kasus penelitian ini berada di tempat yang berbeda, tapi ada hal yang sangat menarik didalam pembahasan penelitian ini adalah peneliti ini

melakukan penelitian pada daerah transmigrasian. Pada dasarnya Pemerintah melakukan ini dikarenakan karena untuk mencoba, menggali dan menemukan potensi unggulan yang ada di daerah tersebut. Dalam empat penelitian ini menjelaskan tentang fokus yang dapat diteliti misalnya adalah ada yang fokus dalam batik tulis, selanjutnya adalah ada yang menjelaskan tentang peranan dari Dinas koperasi dan UMKM. Jadi semua yang terdapat pada pembahasan penelitian tersebut memiliki titik fokus masing-masing.

Berdasarkan pada aspek unit penguatan ekonomi lokal yang ada didalam jurnal tersebut peneliti dapat di klasifikasikan menjadi tiga diantara lain sebagai berikut :

Berdasarkan dari tiga penelitian tersebut yaitu dari peneliti (Muafi, Kusmantini, & Gusaptono, 2009), (Riana, 2016), (Dewa Bagus Sanjaya, Ketut Sudita, 2017). Dari beberapa jurnal yang peneliti klasifikasikan adalah ternyata pada pengelompokan penelitian ini disetiap penelitiannya mempunyai fokus ekonomi kreatif yang berbeda misalnya adalah pada salah satu penelitian ini ada yang menjelaskan tentang produk unggulan dari alam yaitu bambu, ini sangat bermanfaat untuk pembuatan sokasi. Selanjutnya dari penelitian yang lain fokus penelitiannya yaitu menjelaskan tentang penggunaan berbasis e-rediness (kesiapan elektronik) dengan hal ini untuk mempermudah dalam pemasaran produk unggulan. Dan yang terakhir menjelaskan tentang hubungan diplomatik antara indonesia dan korea didalam membangun ekonomi melalui pendekatan *One village One Product (OVOP)*, guna untuk menjaga stabilitas perusahaan di Indonesia serta menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat Indonesia.

Berdasarkan pada aspek pemberdayaan, koperasi, kerajinan dan wisata religi yang ada didalam jurnal tersebut peneliti dapat di klasifikasikan menjadi tiga diantara lain sebagai berikut :

Berdasarkan dari tiga penelitian tersebut yaitu dari peneliti (Winaya et al., 2016), (Mardiana, n.d.), (Triharini, Larasati, & Susanto, 2014), (Lubis, 2015). Pada penelitian yang terakhir ini dapat diklasifikasikan di dalam proses pengelompokan, dikarenakan pada dasarnya penelitian ini ada yang fokus dengan pemberdayaan, koperasi dan lain sebagainya. Dapat dijelaskan bahwasanya dalam konteks pemberdayaan ini lebih fokus pada pemberdayaan petani dan bagaimana caranya strategi Pemerintah untuk merubah pola pikir petani untuk berpikir kemajuan, sedangkan pada konteks koperasi peranan dari sebuah desa Tegallega dalam meningkatkan komoditas utamanya adalah produk hortikultura dikaitkan dengan koperasi Mitra Tani Parahyangan (KMTP) sebagi wadah untuk mengelola dan memasarkan produk anggota. Selanjutnya untuk kerajinan ini lebih terfokus pada pembenahan strategi Pemerintah didalam mengoptimalkan Pendekatan *One Village One Product*. Selanjutnya yang terakhir prospek wisata halal lebih fokus pada pengembangan dikarenakan faktor tempat yang bisa dikatakan religius.

Adapun bentuk tabel dari beberapa klasifikasi penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Studi Literature Review

No	Nama Penulis	Klasifikasi	Hasil Pembahasan
1.	(Syakur, 2014), (oesman raliby, 2016), (Nurunnisha, 2017), (Hakim, 2018), (Kutsiyah, 2017),	Berdasarkan produk-produk unggulan memperhatikan aspek keunikan Makanan	tentang produk unggulannya berupa makanan khas yang ada, souvenir dan lain sebagainya, tetapi di lain sisi juga ada konteks yang mempengaruhi di lima tersebut yaitu tentang produk khas makanan yang ada di setiap daerahnya. Pada dasarnya dalam klasifikasi dari beberapa jurnal tersebut bisa kita ketahui bahwasanya ada perbedaan diantara lain adalah terutam dengan elit-elit yang terkait dengan proses pelaksanaan dari <i>One Village One Product</i> (OVOP), itu bisa berupa didalam pelanggaran program ini masih terdapat kendala yang menghadang yakni tentang masalah permodalan, dari segi pemasaran produk unggulan, keterkaitan dengan teknologi, kurangnya efisiensi terhadap kelembagaan dan lain sebagainya.
2.	(Syamsul Hadi, Olos Wasahua, 2017), (Dewangga, 2018), (Pasaribu, 2011), (Tommy & Putera, n.d.), (Winaya, Rianita, & Pascarani, 2016).	Berdasarkan pada aspek pertanian	Pada hasil pembahasan lebih mengedepankan pada sektor komoditas sektor unggulan dalam pertanian contohnya adalah tanaman bahan makanan, sektor perkebunan, palawija dan lain sebagainya. Disini tujuan dari pendekatan <i>One Village One Product</i> dalam aspek pertanian adalah

			<p>untuk meningkatkan kualitas pasar global, melaksanakan kegiatan pengembangan, dan meningkatkan pendapatan pada setiap daerahnya. Adapun terdapat permasalahannya yakni pada aspek permodalan untuk mengembangkan produk unggulan tersebut, dan peningkatan kinerja pada setiap lembaga yang ada.</p>
3.	<p>(Sri & Wardani, n.d.), (Asriati, n.d.), (Sakdiyah, 2011), (Cahyani, 2013).</p>	<p>Berdasarkan pada aspek Usaha Mikro Kecil Menengah</p>	<p>Pada hasil pembahasan penentuan studi kasus penelitian ini berada di tempat yang berbeda, tapi ada hal yang sangat menarik didalam pembahasan penelitian ini adalah peneliti ini melakukan penelitian pada daerah transmigrasian. Pada dasarnya Pemerintah melakukan ini dikarenakan karena untuk mencoba, menggali dan menemukan potensi unggulan yang ada didaerah tersebut. Dalam empat penelitian ini menjelaskan tentang fokus yang dapat diteliti misalnya adalah ada yang fokus dalam batik tulis, selanjutnya adalah ada yang menjelaskan tentang peranan dari Dinas koperasi dan UMKM.</p>
4.	<p>(Muafi, Kusmantini, & Gusaptono, 2009), (Riana, 2016), (Dewa Bagus Sanjaya, Ketut Sudita, 2017).</p>	<p>Berdasarkan penguatan ekonomi lokal</p>	<p>penelitian ini disetiap penelitiannya mempunyai fokus enokomi kreatif yang berbeda misalnya adalah pada salah satu penilitian ini ada yang menjelaskan tentang produk unggulan dari alam yaitu bambu, ini sangat bermanfaat untuk pembuatan sokasi. Selanjutnya dari penelitian yang lain fokus penelitiannya yaitu menjelaskan tentang penggunaan berbasis e-rediness</p>

			(kesiapan elektronik) dengan hal ini untuk mempermudah dalam pemasaran produk unggulan.
5.	(Winaya et al., 2016), (Mardiana, n.d.), (Triharini, Larasati, & Susanto, 2014), (Lubis, 2015)	Berdasarkan pemberdayaan, koperasi, kerajinan dan wisata religi	Pada hasil pembahasan dalam proses pengelompokan, dikarenakan pada dasarnya penelitian ini ada yang fokus dengan pemberdayaan, koperasi dan lain sebagainya. Dapat dijelaskan bahwasanya dalam konteks pemberdayaan ini lebih fokus pada pemberdayaan petani dan bagaimana caranya strategi Pemerintah untuk merubah pola pikir petani untuk berpikir kemajuan, sedangkan pada konteks koperasi peranan dari sebuah desa Tegallega dalam meningkatkan komoditas utamanya adalah produk hortikultura dikaitkan dengan koperasi Mitra Tani Parahyangan (KMTP) sebagai wadah untuk mengelola dan memasarkan produk anggota. Selanjutnya untuk kerajinan ini lebih terfokus pada pembenahan strategi Pemerintah didalam mengoptimalkan Pendekatan <i>One village One Product</i> . Selanjutnya yang terakhir prospek wisata halal lebih fokus pada pengembangan dikarenakan karena faktor tempat yang bisa dikatakan religius.

Berdasarkan beberapa penelitian yang ada di atas memiliki perbedaan dengan penelitian ini dikarenakan ada beberapa alasan yakni terletak pada objek penelitian yang dapat dikaji, semestinya disetiap peneliti memiliki titik fokus yang hendak diteliti. Selain itu juga ada hal yang menjadi pembeda diantara lain yaitu

pada metode penelitian, karena pada metode penelitian ini seorang peneliti dapat memposisikan antara tema dan metode yang dipakai. Pada tahap hasil dan pembahasan mengalami perbedaan. Peneliti akan membahas tentang bagaimana pelaksanaan program *One Village One Product* di Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan untuk tahap metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan mendapatkan suatu data yang hendak diperoleh peneliti.

F. Kerangka Dasar Teori

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan adanya kejelasan dasar atau landasan pola berpikir di dalam menyelesaikan ataupun menyoroti suatu masalah yang ada. Dengan dengan masalah ini pastinya perlu diadakan ataupun perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pemikiran yang semestinya menggambarkan dari sudut pandang permasalahan yang hendak peneliti akan soroti.

Teori merupakan seperangkat konstruk (variabel) yang saling berhubungan, yang berasosiasi dengan proposisi atau hipotesis yang terperinci hubungan antara variabel tersebut. Untuk itu dengan adanya kerangka teori ini, selanjutnya didalam suatu penelitian terutama untuk melakukan identifikasi masalah ataupun menylediki masalah harus adanya kekuatan teori. Dengan adanya kekuatan teori ini semestisnya harus sesuai dengan permasalahan yang hendak diselesaikan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini terdapat teori-teori yang dapat dipaparkan yaitu sebagai berikut :

A. Teori Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Pada dasarnya konsep implementasi kerap sekali diperbincangkan di kalangan intelektual maupun para pakar yang memberikan sumbangsih atau kontribusi penuh terhadap implementasi kebijakan yang merupakan suatu tahap-tahap dari proses kebijakan. Pada kenyataanya para pakar memberikan suatu pemikiran berkenaan dari sebuah implementasi kebijakan, diperlukan adanya pemikiran yang kritis guna untuk mencapai tujuan tersebut.

Implementasi merupakan suatu langka-langkah ataupun tahapan dari sebuah pelaksanaan dengan adanya rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna dan siap untuk dilaksanakan.

Menurut Nurdin Usman menyatakan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan yang didalamnya ada aktivitas, tindakan, aksi, atau adanya suatu sistem atau mekanisme, sedangkan implementasi bukan hanya sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang adanya perencanaan dan pastinya dapat mencapai tujuan suatu kegiatan. (Usman, 2002)

Menurut Agostino menyatakan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang sangat dinamis, dikarenakan ada pelaksana suatu kebijakan dapat melakukan suatu kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu nilai atau hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan tersebut.(Agostino, 2010).

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi intinya adalah kegiatan untuk membagikan pengeluaran suatu kebijakan (*to deliver policy output*) yang dapat dilakukan oleh para implementor untuk kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”.(Purwanto & Sulistyastuti, 1991)

Dari beberapa pengertian yang ada diatas itu menunjukkan suatu proses implementasi yang berdasarkan mekanisme atau sistem yang ada. Berdasarkan pendapat oleh seorang para ahli yang ada diatas maka peneliti dapat disimpulkan implementasi adalah suatu agenda atau kegiatan yang dapat dilaksanakan atau dilakukan karena dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam hal ini faktor yang dapat mempengaruhi proses implementasi adalah kebijakan yang dibuat pada dasarnya ketika kebijakan atau aturan yang dibuat secara ketidaksesuaian terhadap masyarakat kebijakan itu bakal menghasilkan suatu implementasi yang tidak sempurna.

2. Model-Model Implementasi

Kebijakan publik yang telah ditetapkan atau sudah dipersetujui oleh seseorang pembuatan kebijakan itu sebenarnya memfokuskan pada tingkat implementasi dari sebuah program. Oleh karena itu kebijakan publik itu masih bersifat tidak jelas didalam pelaksanaannya.

Proses Implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak, seperti dikemukakan oleh (Abdullah, 1997) yaitu :

1. Adanya program dan kebijakan yang dilaksanakan

2. Target Groups, yaitu kelompok masyarakat yang akan menjadi sasaran, dan diharapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan
3. Unsur pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Berdasarkan konsep implementasi kebijakan didalam suatu proses pengembangan produk unggulan disetiap daerah, semestinya mampu menerapkan strategi yang lebih berinovasi dan kreatif. Karena dengan demikian strategi ini bertujuan untuk membantu kualitas produk unggulan yang ada. Dengan cara melakukan survei tentang permasalahan yang ada dan dapat diformulasikan didalam kebijakan yang ada. Sebagaimana mestinya proses ini mampu meningkatkan daya saing di setiap daerah yang ada.

Pada aspek pendekatan implementasi kebijakan dapat diklasifikasikan adalah sebagai berikut yakni bersifat *top-down*, *bottom up*, dan sintesa. Jadi semua itu mempunyai peranan dan fungsi masing-masing. Seperti kita ketahui bahwasanya pendekatan *top-down* adalah proses yang dimulai dari atas kemudian untuk melakukan suatu pemetaan ke bawah dengan cara melihat keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan. Pada dasarnya pendekatan *top-down* ini identik dengan *command and control* atau yang disebut dengan keberhasilan implementasi kebijakan didasarkan pada kejelasan perintah dan cara mengawasi atasan kepada bawahan. Dengan hal ini adapun model pendekatan implementasi kebijakan yang bersifat *top-down* itu seperti yang dikemukakan oleh Daniel A

Mazmanian dan Paul Sabatier, Van Meter dan Van Horn, dan Edward III dan Grindle.

Pendekatan *bottom up* adalah proses yang dimulai level bawah pada jaringan implementasi. Pada pendekatan *bottom up* ini identik dikarenakan muncul kritikan dari pendekatan *top-down*. Oleh karena itu pendekatan *bottom up* lebih memperhatikan pada aspek level birokrat dan kelompok sasaran, selain itu juga pendekatan *bottom up* ini menekankan pada kelompok sasaran dilibatkan dari awal mulai proses sampai implementasi kebijakan. Pendekatan *bottom up* dipelopori oleh Elmore, Lipsky, Berman Herjn dan Portner.

Pendekatan Sintesis (Hybrid Theories) adalah penggabungan dari beberapa teori yang dapat disimpulkan dari model teori *top-down* dan *bottom up* sehingga terbentuk teori tersebut. Model Implementasi ini juga dipengaruhi beberapa persepsi diantaranya adalah implementasi sebagai evolusi, implementasi sebagai pembelajaran, implementasi sebagai hubungan antar organisasi dan lain sebagainya. Pendekatan sintesa adalah pendekatan yang mengkolaborasikan intervensi Pemerintah dengan partisipasi masyarakat secara aktif, pendekatan ini juga bisa diterapkan berbagai masalah tentang implementasi kebijakan.

Adapun alasan peneliti untuk menggunakan teori dari Model Daniel A Mazmania dan Paul Sabatier adalah untuk menjawab permasalahan tentang suatu objek penelitian yang akan dikaji seorang peneliti. Pada dasarnya teori yang dapat digunakan ini juga berkaitan dengan variabel-variabel yang terkait pada teori implementasi kebijakan dari Daniel A Mazmania dan Paul Sabatier yaitu mudah atau tidaknya masalah yang akan dikerjakan, kemampuan kebijakan menstruktur

proses implementasi secara tepat dan para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat, dan variabel-variabel diluar undang-undang yang mempengaruhi proses implementasi.

Maka dari itu pentingnya seorang peneliti untuk mengkaji permasalahan dengan menggunakan teori Daniel A Mazmania dan Paul Sabatier, Sehingga nantinya penelitian ini mengarah pada sejauhmana tindakan para pelaksana sesuai dengan prosedur dan tujuan yang telah digariskan para pembuat kebijakan pada Pemerinatah pusat. Dengan adanya hal ini dapat menjadikan evaluasi dari organisasi atau birokrasi untuk selalu mengedepankan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakannya.

Dengan hal ini, teori implementasi kebijakan yang dapat diberikan oleh Daniel A Mazmanian dan Paul Sabatier adalah bentuk implementasi kebijakan yang bersifat *top-down*, dikarenakan dimulainya dari atas kemudian untuk melakukan suatu pemetaan ke bawah dengan cara melihat keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan. Model dari implementasi yang dapat ditawarkan disebut dengan A Framework for policy implementation analysis.

Adapun makna dari implementasi menurut Daniel A Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Wahab, 2008) dapat dilihat sebagai berikut :

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program yang sudah dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau yang telah terjadi”

Dari pandangan kedua para ahli yang ada diatas dapat dikatakan bahwasanya suatu implementasi kebijakan itu sebenarnya tidak hanya terkait dengan perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu program yang telah disahkan, tetapi juga melibatkan pada kelompok sasaran, jaringan kekuatan politik, sosial dan ekonomi jadi semua itu saling ketergantungan dan mempengaruhi segala pihak maupun elemen yang terlibat.

Menurut kedua ahli teori tersebut, bahwasanya adanya peranan penting terhadap implementasi kebijakan. Diperlukan adanya kapabilitas dalam mengidentifikasi suatu variabel yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan resmi pada tingkat proses implementasi. Adapun indikator dan variabel yang dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian besar adalah sebagai berikut :

(a) Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi :

- (1) Kesukaran-kesukaran dalam teknis
- (2) Keberagaman perilaku yang diatur
- (3) Persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran
- (4) Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki

(b) Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat

para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara adalah sebagai berikut :

- (1) Kecermatan dan penjelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi akan dicapai
- (2) Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan

- (3) Ketetapan alokasi sumber dana
 - (4) Keterpaduan hirararki di dalam lingkungan dan diantara lembaga atau instansi pelaksana
 - (5) Aturan-aturan pembuatan keputusan dari badan pelaksana
 - (6) Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termasuk dalam undang-undang
 - (7) Akses formal pihak-pihak luar
- (c) Variabel-variabel diluar Undang-Undang yang mempengaruhi implementasi
- (1) Kondisi sosial ekonomi dan teknologi
 - (2) Dukungan publik
 - (3) Sikap dan sumber yang dimiliki kelompok masyarakat
 - (4) Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana

B. *One Village One Product (OVOP)*

1. Pengertian *One Village One Product (OVOP)*

Program satu desa satu product (OVOP) ini merupakan suatu program nasional bertujuan untuk mengembangkan perekonomian yang ada di tingkat desa. Pada dasarnya dengan adanya program ini harapannya adalah setiap desa dapat menemukan atau mengembangkan sumber daya yang ada, sehingga nantinya dapat tumbuh produk unggulan di setiap desa. Tapi dengan adanya produk unggulan tersebut, semestinya mempunyai ciri khas atau perbedaan dengan produk unggulan yang lainnya.

Dalam kesempatan ini masyarakat setempat diberikan suatu pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana konsep dari *One Village One Product (OVOP)*.

Dari pemahaman yang telah diberikan oleh masyarakat ini semestinya bisa diterima masyarakat lebih baik. Untuk satu desa harapannya mampu menghasilkan produk unggul yang terbaik dan juga masyarakat dituntut untuk lebih mempunyai kreativitas yang tinggi, karena dengan demikian hasil yang didapatkan berbeda dengan desa yang lainnya.

Menurut Sugiharto dan Syamsul Rizal (2008) adalah adanya aktivitas-aktivitas *One Village One Product* untuk revitalisasi perekonomian pada Provinsi Oita, pulau Kyusu di Jepang. Sebenarnya di dalam konsep program OVOP ini masyarakat harus bisa menciptakan produk keunggulan daerahnya. Untuk bisa menciptakan produk unggulan dan jasa yang penuh kompetitif ini, masyarakat harus sinergi didalam menciptakan. Sehingga kedepannya dapat diterima bagi kalangan masyarakat secara regional, nasional maupun secara internasional. Pengembangan program OVOP ini semestinya adanya hubungan antara Pemerintah dan masyarakat. Dalam kasus ini masyarakat yang menjadi objek untuk mengembangkan produk unggulan didaerahnya. Mungkin secara garis besar hal yang dapat melatar belakangi konsep dari program OVOP ini adalah sebagai berikut :

- 1.) Adanya proses urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota sehingga menyebabkan di kota menimbulkan kepadatan. Dengan demikian dengan adanya program OVOP ini, masyarakat setempat bisa mengerjakan dan mengembangkan produk unggulan disetiap daerahnya.
- 2.) Untuk bisa ataupun dapat menjalankan suatu pertumbuhan perekonomian yang ada ditingkat pedesaan, maka hal yang sangat

menarik adalah dengan membangkitkan roda kegiatan ekonomi dengan adanya kesesuaian pada tingkat desa.

- 3.) Salah satu tindakan yang dapat mengurangi ketergantungan antara masyarakat desa dengan Pemerintah daerah ataupun secara Pemerintah pusat.

2. Prinsip Gerakan OVOP

Dalam mengupayakan gerakan *One Village One Product* ini menjadi alasan untuk menjadikan pedoman atau prinsip dasar demi mewujudkan *One Village One Product* . Karena pada dasarnya gerakan itu bisa hancur atau runtuh tanpa didasari kekuatan (*power*). Maka dengan demikian Gerakan OVOP ini memiliki tiga prinsip utama yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a.) Berpikir global, bertindak lokal (*local yet global*)

Pengembangan gerakan OVOP adalah tidak terlepas dengan produk-produk unggulan suatu daerah. Dalam hal ini, komoditas produk unggulan yang ada suatu daerah yang bersifat lokal haruslah dikembangkan dan perbedayakan. Oleh karena itu, dengan adanya perubahan-perubahan dalam komoditas produk unggulan lokal, diharapkan dapat menambah nilai ekonomis bagi masyarakat setempat.

- b.) Usaha mandiri dengan inisiatif dan kreativitas (*self reliance and creativity*)

Dengan adanya kebijakan program *One Village One Product* (OVOP) dapat menciptakan rasa kemandirian dan kreativitas dalam bidang atau sektor produk unggulan masing-masing. Melalui kebijakan Pemerintah *One Village One Product* ini, masyarakat yang akan bisa menjadi penggerak produk unggulan

setempat dan masyarakat sendiri yang akan menjadi pekerjanya. Peranan Pemerintah dalam hal ini adalah sebagai alat fasilitator, dengan demikian masyarakat akan mendapatkan kemudahan dalam mengembangkan potensi daerah yang ada.

c) Perkembangan sumber daya manusia (*human resource development*)

Pada dasarnya pengembangan sumber daya manusia dalam menggerakkan kebijakan program Pemerintah *One Village One Product* adalah faktor utama di dalam pelaksanaannya. Dengan berlandaskan Intruksi Presiden No 6 Tahun 2007, maka dari itu dengan adanya dasar hukum tersebut harapannya sebagai alat untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada objek penelitian ini, membahas tentang produk unggulan kakao, semestinya perlu didukung petani atau sumber daya yang lainnya. Dengan memberikan pengetahuan dan wawasan yang terkait dengan pengembangan produk unggulan kakao tersebut.

3. Kriteria OVOP

Dalam penentuan kriteria-kriteria di dalam proses implementasi program *One Village One Product* sangat fundamental. Kesalahan didalam penetapan kriteria akan menjadi penghalang dan penghambat proses pengembangan program *One Village One Product*. Adapun penetapan Kriteria didalam komoditas/produk unggulan adalah sebagai berikut.

- a. Dengan adanya produk unggulan yang berada di desa ataupun daerah dengan memanfaatkan kompetensi secara turun-temurun
- b. Suatu komoditas atau produk unggulan yang mempunyai khas dan unik

- c. Berdasarkan pada sumber daya setempat atau daerah.
- d. Produk unggulan atau komoditas yang mempunyai kualitas yang menarik
- e. Adanya harapan untuk menuju dalam pasar domestik atau internasional
- f. Menyandang nilai ekonomis yang tinggi
- g. Dapat menjadi penarik bagi perekonomian masyarakat

G. Definisi Konseptual

1. Implementasi merupakan suatu tindakan atau cara yang dapat dilakukan dari seseorang yang membuat kebijakan guna nantinya kebijakan yang dibuat itu akan menghasilkan tujuan dan sasaran yang diharapkan
2. *One Village One Product* merupakan konsep pembangunan ekonomi yang memanfaatkan potensi daerah dengan cara menghasilkan produk unggulan daerahnya dan mendapatkan nilai jual yang sangat tinggi

H. Definisi Operasional

Pengertian definisi operasional menurut koentjaraningrat adalah suatu usaha untuk mengkonsep yang berupa konstrak dengan suatu kata yang menggambarkan perilaku ataupun gejala yang dapat diuji kebenararan oleh orang yang lainnya.

Dalam penelitian ini untuk mengukur suatu tahap implementasi *One Village One Product* di Desa Banjaroya, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo. Adapun pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan impelementasi suatu program adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Definisi Operasional

NO	Variabel	Indikator
1.	Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap	(1) Kesukaran-kesukaran dalam teknis (2) Keberagaman perilaku yang diatur (3) Persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran (4) Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki
2.	Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat Para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat	(1) Kecermatan dan penjelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi akan dicapai (2) Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan (3) Ketetapan alokasi sumber dana (4) Keterpaduan hirararki di dalam lingkungan dan diantara lembaga atau instansi pelaksana (5) Aturan-aturan pembuatan keputusan dari badan pelaksana (6) Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termasuk dalam undang-undang (7) Akses formal pihak-pihak luar
3.	Varibel-variabel diluar	(1) Kondisi sosial ekonomi dan teknologi

	<p>Undang-undang yang mempengaruhi implementasi</p>	<p>(2) Dukungan publik</p> <p>(3) Sikap dan sumber yang dimiliki kelompok masyarakat</p> <p>(4) Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana</p>
--	---	---

I. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah salah satu unsur yang sangat terpenting didalam melakukan penelitian. Sehingga dengan adanya metode penelitian ini, penulis mampu untuk menjawab permasalahan yang hendak disoroti.

Sementara peneliti harus bisa mewujudkan rangkaian pengumpulan data informasi dan peneliti dapat melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Seperti kita ketahui untuk melihat setiap metode yang ada tidak lain dan tidak bukan mempunyai sisi kelebihan maupun kekurangan untuk menjawab suatu permasalahan di dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode yang berbeda di dalam melakukan suatu penelitian supaya nantinya bisa saling mengisi dan melengkapi satu sama lainnya.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif ini lebih menggambarkan tentang bagaimana kejadian, fenomena dan gejala sosial yang ada.

Dengan demikian cukup menarik seorang peneliti untuk melakukan penelitian pada fenomena kali ini. Selanjutnya di dalam laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Laporan tersebut itu bisa berupa naskah wawancara, catatan lapangan foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian kali ini diambil dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo dan Kelompok Tani di Desa Banjaroya. Mengapa peneliti mengambil lokasi penelitian di instansi dan Kelompok Tani tersebut, dikarenakan memang instansi dan kelompok Tani tersebut yang mempunyai peranan di dalam menjalankan roda-roda program dari Pemerintah.

3. Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan terkecil yang merupakan objek nyata yang akan hendak diteliti sesuai dengan permasalahan yang ada dan pokok pembahasan masalah dalam penelitian. Didalam unit analisis berisi tentang unit atau kesatuan yang menjadi subjek dan objek penelitian.

Dalam melakukan unit analisis penelitian sosial itu mencakup beberapa ragam unit penelitian diantaranya adalah Ketua kelompok pertanian, dan instansi Pemerintah. Sehingga nanti nya ketika melakukan suatu analisis penelitian sosial ini dapat mempermudah dalam melaksanakannya. Berdasarkan substansi tersebut Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo akan diminta informasinya sebagai basis data, selain itu juga peneliti akan mengambil data dari Kelompok Tani di Desa Banjaroya yang akan menjadi objek penelitian.

4. Jenis Data

Untuk Melakukan suatu penelitian diperlukan data untuk mendukung jalannya kegiatan penelitian, adapun jenis data yang dapat diperlukan adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau didapatkan langsung dari responden untuk memperoleh informasi dan keterangan yang berkaitan dengan objek penelitian yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data tambahan dengan menggunakan bahan-bahan yang dianggap sesuai atau relevan bisa dari buku, literature dan peraturan perundang-undangan atau dokumentasi yang lainnya.

- 1) Pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait dengan bagaimana pelaksanaan pendekatan *One Village One Product*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis atau hal yang utama didalam melakukan suatu penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui bagaimana cara teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam penelitian kualitatif berdasarkan 3 tahap yaitu adanya observasi, wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Adapun 3 tahap tersebut

dapat dilakukan dengan baik dalam pencarian data berdasarkan sumber data yang dapat dipercaya dan up to date.

a. Observasi

Teknik pengumpulan data observasi ini merupakan metode yang dapat dilakukan dengan mengamati sebuah fenomena yang didasarkan pada pengetahuan atau gagasan-gagasan yang terkait dengan objek penelitian yang akan bertujuan untuk memperoleh suatu informasi ataupun data yang dikehendaki.

Nasution (1980) dalam Sugiyono menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dengan bantuan alat canggih.

Pada dasarnya teknik pengumpulan data secara observasi diperlukan adanya pengamatan secara langsung melihat dan mengamati sebuah proses pelaksanaan program *One Village One Product* Kabupaten Kulon Progo. Berkaitan dengan objek yang akan diteliti, maka dari itu peneliti akan melakukan suatu pengumpulan dan pencatatan yang akan diteliti.

1. Mengamati implementasi proses kebijakan melalui pendekatan *One Village One Product* di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan atau seorang otoritas (seorang ahli atau yang berwenang dalam suatu masalah). Peneliti melakukan interview

kepada Narasumber, penelitian dengan pertimbangan ingin memperoleh data secara langsung dari responden sehingga kebenaran sesuai dengan fakta dan tidak diragukan lagi. Data yang ingin diperoleh mengenai perubahan setelah adanya bentuk dari pemberdayaan masyarakat.

Pada tahap metode wawancara yang dapat dilakukan adalah dengan cara mewawancarai secara terstruktur menggunakan pedoman wawancara, dengan hal ini dapat ditetapkan terlebih dahulu masalah dan pertanyaan yang akan diajukan kepada Narasumber. Tujuan dengan adanya seperti ini harapannya dapat melengkapi dan mengecek ulang data dari hasil observasi di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon progo.

Wawancara dapat dilakukan secara mendalam untuk memperoleh data langsung melalui rangkaian tanya jawab dengan pihak yang terkait dengan pelaksanaan program *One Village One Product* di Dinas pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo.

1. Kepala Dinas di Dinas Pertanian Kabupaten Kulon progo.
2. Ketua kelompok tani di Desa Banjaroya

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ini adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, (*life story*), kreteria, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-

lain. Melalui teknik dokumentasi ini akan diamati fenomena dari objek yang diteliti dari berbagai dokumen yang ada.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data dapat diperoleh melalui teknik wawancara, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data secara induktif terhadap data yang diperoleh. Data dapat diperoleh mengenai pelaksanaan *One Village One Product* dari berbagai sumber akan dianalisis secara mendalam dengan logika induktif dan disikapi dengan akal sehat tentang fenomena yang terkait dengan pelaksanaan program *One Village One Product* di Kabupaten Kulon Progo. Sehingga nantinya dapat diketahui bagaimana pelaksanaan program OVOP di Desa Banjaroya, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2017. Secara rinci tahap analisis dalam penelitian adalah sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan, maka peneliti akan mengolah suatu data untuk mengatasi adanya keterbatasan pola ingat dari peneliti. Setelah data semua dapat dikumpulkan langkah selanjutnya adalah dengan cara diketik. Langkah reduksi data adalah berguna untuk memilah dan memisahkan suatu data yang mengalami penggadaan. Dengan demikian proses reduksi data ini dapat memilah atau menseleksi data yang menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan program *One Village One Product* di Desa Banjaroya, Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo. Tentu saja, ketika data semuanya sudah terkumpul, maka bisa memberikan gambaran yang lebih jelas dan mampu mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

b. Pembahasan

Dalam pengumpulan data yang sudah terkumpulkan melalui reduksi kemudian diartikan sesuai dengan logika induktif dengan cara menjelaskan terlebih dahulu fenomena yang akan terjadi di lapangan, langkah selanjutnya adalah dengan cara mengidentifikasi sehingga nantinya menjadi sebuah uraian yang dapat dimengerti dan dipahami oleh sang pembaca. Dengan hal ini, mengenai penjelasan aspek yang akan diteliti atau yang ditulis secara terpisah dalam sebuah bab yang ada. Selanjutnya dalam pembahasan lebih memfokuskan dan mencegah adanya pembahasan yang sama atau bisa dikatakan tumpang tindih.

c. Pengambilan Kesimpulan

Tahap terakhir didalam melakukan suatu pengumpulan data adalah dengan cara membuat kesimpulan terhadap pembahasan yang sudah dilakukan didalam bab sebelumnya. Pada tahap selanjutnya yang dapat dilakukan didalam pembahasan adalah melakukan meringkas yang berkaitan dengan proses Implementasi Program *One Village One Product* di Desa Banjaroya, Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo. Maka yang dapat menjadi tujuan akhir dari sebuah penelitian yakni kesimpulan.